

PENGAMBIL SAMPAH SWASTA 'MENJERIT'

## Armada Sampah Nonhidrolis Tak Bisa Masuk TPSP

**PIYUNGAN (KR)** - Larangan armada pengangkut sampah nonhidrolis masuk ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Kabupaten Bantul banyak dikeluhkan jasa pengambil sampah. Aturan yang mulai diberlakukan 1 Mei 2020 membuat jasa penarik sampah swasta kelabakan.

Padahal selama ini mereka jadi tumpuan warga untuk mengambil sampah. Sementara paguyuban pengambil sampah swasta yang tergabung dalam wadah 'Eker-eker Golek Menir' dengan kebijakan pemerintah tersebut harus membuat pelimbangan atau tempat pemindahan sampah dari armada manual ke hidrolis.

"Sejak aturan armada nonhidrolis dilarang masuk

TPST, kami langsung membuat pelimbangan atau tempat pemindahan sampah dari armada nonhidrolis ke hidrolis," ujar Ketua Paguyuban 'Eker-eker Golek' Sodik Marwanto, Senin (4/5).

Menurutnya, pemberlakuan aturan tersebut harusnya menyesuaikan kondisi di lapangan. Merujuk data persentase jumlah armada berhidrolis dengan yang belum, jumlahnya tidak sebanding.

Padahal mereka yang nonhidrolis itu jadi tulang punggung pengambilan sampah di masyarakat. Artinya kalau mereka tidak bisa langsung ke TPST, akan memunculkan persoalan baru. Banyak jasa pengambil sampah swasta benar-benar kelabakan menyikapi aturan baru ini. Sebenarnya ada kebijakan dari pemerintah, armada warga sekitar masih boleh masuk meski nonhidrolis.

"Oleh karena itu, agar proses pengambilan sampah dari masyarakat tetap berjalan lancar dan tidak terjadi penumpukan kami membuka tempat pelimbangan. Langkah tersebut kami ambil agar armada non hidrolis tetap kerja," ujar Sodik.

Banyak faktor ketika jasa pengambil sampah swasta enggan pindah ke hidrolis. Mulai dari modal yang belum cukup hingga armada yang sekarang digunakan masih kredit. Tetapi ada faktor lain sangat mendasar yakni lokasi pengambilan sampah jalannya terlalu sempit sehingga tidak bisa dilalui kendaraan besar. Oleh karena itu



KR-Sukro Riyadi

**Proses pelimbangan sampah dari armada nonhidrolis di Banguntapan Bantul.**

Paguyuban 'Eker-eker Golek Menir' berharap pemerintah bersikap bijak dengan kondisi saat ini.

"Sebenarnya larangan ken-

daraan non hidrolis masuk TPST itu agar bongkar sampah lancar. Kalau itu tujuannya prasarananya dipersiapkan, alat beratnya disiapkan

tempatnyanya juga. Tapi di lapangan tempat belum siap alat berat belum, sehingga bongkar tidak lancar," jelasnya. (Roy)-a

PRODUKSI MENURUN DRASTIS

## Virus 'Ngoser' Serang Bawang Merah



KR-Judiman

**Tanaman bawang merah di sekitar Baros kondisinya rusak.**

**BANTUL (KR)** - Di tengah mengganasnya virus Korona di seluruh dunia, termasuk di Bantul, kawasan pantai selatan Bantul wilayah Kalurahan Tirtohargo Kretek muncul virus 'ngoser' yang menyerang tanaman bawang merah di sekitar Pedukuhan Baros. Tak kurang dari 10 hektar tanaman bawang mengalami gagal panen, atau setidaknya hasil panen mengalami penurunan drastis.

Plembang, salah seorang

petani bawang merah di Baros, Minggu (3/5) menjelaskan, tanaman bawang merah sekitar Baros pada awalnya ketika masih umur 1 hingga 15 hari pertumbuhan masih tampak bagus, tapi menginjak umur 20 hari kondisi tanaman menguning dan layu hingga musim panen.

Akibatnya produksinya mengalami penurunan drastis, kualitasnya jauh dari standar, biasanya hasil panen mampu mencapai 50 Kg

perRu, tapi saat ini hanya bisa memetik rata-rata 20-25 Kg perRu. "Itupun kualitasnya sangat rendah, sehingga harga jualnya tidak seperti kalau panen normal. Padahal harga bawang merah sekarang sedang bagus, bisa mencapai Rp 30.000 per Kg. Tapi dengan hasil panen yang tidak optimal karena serangan virus ini, petani tetap mengalami rugi," jelas Plembang.

Kegagalan panen bawang merah di sekitar Baros ini karena pengaruh musim, yang kadang turun hujan kadang panas, termasuk munculnya virus. Petani bawang merah menamakan virus 'ngoser'. Tanaman bawang merah yang terserang virus tersebut, mengalami kerusakan daun yang kemudian menguning, akhirnya tanaman mati.

Tapi ada beberapa petani yang bernasib baik, karena tanamannya tidak terserang virus, sehingga hasil panennya normal. (Jdm)-a

TAKMIR MASJID ADZ DZAKIRIN NGRANCAH

## Ramadan Tetap 'Hidup' di Tengah Covid-19

**IMOIGIRI (KR)** - Pandemi Covid-19 sudah mengubah pola hidup di tengah masyarakat. Ajuran pemerintah agar menjaga jarak, menghindari kerumunan sebagai langkah mencegah Covid-19 meluas. Kondisi tersebut tentu berimbas pada banyaknya kegiatan keagamaan di bulan Ramadan tahun ini ditiadakan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan agar kegiatan keagamaan di bulan Ramadan berjalan tanpa melanggar anjuran pemerintah.

Seperti Takmir Masjid Adz Dzakhirin Ngrancah Sriharjo Bantul. Pengurus takmir tetap berusaha menjalankan kegiatan Ramadan dengan konsep berbeda. "Takjilan, salat taraweh, pengajian tetap kami adakan dengan kemasaran berbeda. Pengurus takmir berharap kemeriahan Ramadan harus terjaga agar warga semangat menjalankan ibadah," ujar Penasihat Takmir Masjid Adz Dzakhirin Ngrancah Sriharjo Imogiri, Sudadi didampingi Ketua Takmir Sukamto, disela pengajian live streaming bersama Wakil Bupati

Bantul, H Abdul Halim Muslih, Sabtu (3/5).

Sudadi mengatakan, kegiatan takjilan Senin sampai Sabtu digelar setiap RT. Kemudian untuk hari Minggu seluruh masyarakat Ngrancah mendapatkan makanan takjil.

"Sebelum program ini dijalankan takmir mendata setiap KK berapa anggota keluarga yang puasa data itu acuan kami membagikan nasi takjilan," ujarnya. Sistem pembagian nasi takjil diantar ke rumah masing-masing oleh relawan masjid dan juga mudamudi Dusun Ngrancah. Sumber pendanaan untuk kegiatan pembagian takjil digalang dari iuran warga.

Selain takjilan, Takmir Masjid Adz Dzakhirin Ngrancah mendorong agar salat taraweh dilakukan di rumah warga. "Khusus lokasi salat taraweh kami adakan di 29 rumah warga, dengan demikian masyarakat bisa tetap taraweh dengan jumlah peserta sedikit usia anjuran pemerintah," jelasnya. (Roy)-a

'UMY MENGABDI'

## Penuhi Buka Puasa dan Sahur Mahasiswa

**BANTUL (KR)** -Kebutuhan sahur dan berbuka puasa bagi mahasiswa UMY, terlayani dengan program pembagian makanan sahur dan takjil yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPi). Program yang rencananya diselenggarakan hingga hari ke-25 Ramadan menyediakan makanan buka dan sahur bagi mahasiswa.

Program 'UMY Mengabdi' pembagian makanan sahur serta takjil untuk berbuka puasa kepada 1.530 mahasiswa. Pimpinan LPPi, M Khaeruddin Hamsin Lc LLM PhD, kemarin, mengungkapkan meski direncanakan berlangsung hingga hari ke-25 Ramadan namun tidak tertutup kemungkinan bisa berlangsung hingga Hari Idul Fitri. "Hal yang kami tekankan di sini adalah bagaimana kebutuhan para mahasiswa terlayani dengan baik agar bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tenang dan tanpa rasa galau," harapnya.

Program ini diluncurkan karena terkait wabah Covid-19 tidak sedikit mahasiswa UMY yang masih bertahan di sekitar kampus, karena tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Tutupnya beberapa warung makan menjadi permasalahan tersendiri bagi para mahasiswa terkait dengan akses untuk mendapatkan makanan sahur dan

berbuka puasa. Kegiatan yang dilaksanakan sejak hari kedua Ramadan ini untuk pembagian sahur dimulai pukul 02.00-03.00. Sedang pengambilan takjil pukul 16.00-17.30.

"Pengambilan makanan menggunakan teknis drive thru dan juga para mahasiswa diwajibkan memakai masker. Para mahasiswa yang sudah mendaftarkan dirinya pada formulir yang tertera di KRS Online cukup menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) untuk mendapatkan makanan sahur dan takjil untuk berbuka puasa," jelasnya.

Selain melibatkan relawan dari Tim Gugus Tugas Covid-19, kegiatan 'UMY Mengabdi' ini juga melibatkan relawan yang berasal dari para mahasiswa yang mengabdikan dirinya untuk menjadi panitia Ramadan UMY.

Rektor UMY Dr Ir Gunawan Budiyanto MP IPM mengatakan bahwa program 'UMY Mengabdi' ini akan terus dievaluasi pelaksanaannya menyesuaikan dengan kondisi pandemik yang ada. "Harapan saya, semoga program ini dapat berjalan dengan lancar. Juga, untuk para relawan dan mahasiswa, semoga dapat tertanamkan nilai-nilai kesetiakawanan dan juga indahnya saling berbagi," ungkapnya. (Fsy)-a

KUOTA TERBATAS 250 ORANG

## Hari Ini, Rapid Tes untuk Warga

**BANTUL (KR)** - Pemkab Bantul hari ini Selasa (5/5), melayani pengecekan Rapid Tes pada warga. Adapun pendaftaran dengan kuota sebanyak 250 warga ini sudah dimulai pada Minggu (3/5) melalui aplikasi yang telah dibuat Dinas Kominfo.

Juru Bicara (Jubir) Gugus Penanganan Covid-19, dr Sri Wahyu Joko Santoso, menuturkan syarat utama mendaftarkan diri yakni menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon pribadi. Adapun Rapid Tes akan menyorak warga umum dengan kriteria tertentu d8 antaranya memiliki riwayat perjalanan dari daerah terjangkit khususnya epidemi tinggi seperti Jabodetabek, Surabaya dan Bali. Selain itu kriteria lain yakni warga yang berkontak erat dengan pasien positif terkonfirmasi.

"Atau bisa saja, warga ini berkontak erat dengan Orang Tanpa Gejala (OTG) dengan warga yang telah dilakukan Rapid Tes dan hasilnya positif," jelasnya.

Adapun cara mendaftarkan diri warga di persilahkan mendaftarkan diri melalui aplikasi yang dibuat oleh Dinas kominfo Bantul. Dengan target maksimal pelayanan 250 orang, warga yang sudah mendaftarkan diri dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Setelah lolos verifikasi pelaksanaan Rapid Tes dilaksanakan pada Selasa (5/5). "Sistem akan otomatis tertutup seandainya jumlah sasaran sudah terpenuhi," tegasnya. (Aje)-a

ABK YANG DIPULANGKAN

## Jalani 'Lockdown' dan Diawasi

**BANTUL (KR)** - Anak Buah Kapal (ABK) warga Kabupaten Bantul yang dipulangkan dari tempat kerjanya, mendapatkan pengawasan dan menjalani lockdown paling tidak selama 14 hari. Mereka juga wajib menjalani pemeriksaan kesehatan, walaupun sudah mendapatkan surat keterangan sehat dari perusahaan atau negara tempat mereka bekerja.

Hal tersebut dikemukakan, Kepala Dinas Kesehatan Bantul, Agus Budi Raharjo, Jumat (1/5), terkait tenaga kerja asal Bantul yang dipulangkan atau dirumahkan akibat dari dampak wabah Covid-19 yang melanda dunia. "Mereka juga seperti warga setempat, wajib pakai masker, tidak boleh melakukan kegiatan berkelompok dan lainnya," tegas Agus.

Sementara menurut Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul, Istiril Widilastuti, sampai saat ini ada 32 orang ABK yang dipulangkan dari beberapa negara tempat mereka bekerja. Kepulangan mereka membawa surat keterangan sehat dari tempat kerjanya, karena sebelum dipulangkan mereka diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan.

Dengan dipulangkan ABK tersebut, maka menambah angka pengangguran sementara di Bantul. Penambahan lain berasal dari pemutusan kontrak kerja 38 orang, pekerja dirumahkan 5.745 orang, PHK massal 236 orang, Pekerja Imigran Indonesia 96 orang dan pemutusan hubungan kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) 14 orang. (Jdm)-a

HASIL KERJA KERAS SEMUA PIHAK

## Sejak 2012, Bantul Raih WTP Terus-menerus

**BANTUL (KR)** - Pemkab Bantul kembali meraih penilaian keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penilaian keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun prestasi ini merupakan prestasi ke-8 kali yang diperoleh Pemkab Bantul sejak tahun 2012.

Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul, Drs Trisna Manurung MSI, kepada KR, Senin (4/5), menuturkan prestasi ini merupakan dampak kerja keras dan sinergitas dari seluruh pihak utamanya jajaran pimpinan dan pegawai Pemkab Bantul.

Dari prestasi WTP ini masih ada beberapa catatan yang harus diperbaiki. Catatan ini seperti Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) menara telekomunikasi yang sudah tidak ada tapi pajak masih ditagih.

"Barang sudah tidak ada, tapi pajak masih ditagih. Hal seperti ini yang perlu dirapikan. Selain itu pengelolaan belanja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga perlu dilakukan pencermatan secara lebih rinci," jelasnya.

Adapun penilaian WTP, imbuh Trisna, merupakan domain BPK. Penilaian tersebut diberikan Pemkab/Pemkot ketika laporan keuangannya telah memenuhi kaidah seperti kepatuhan dan sesuai perundangan yang berlaku.

Sekda Bantul, Drs Helmy Jamharis MSI, menyatakan sejak 2012, Pemkab Bantul telah



KR-Rahajeng Pramesi

**Pemberian piagam oleh BPK DIY kepada Bupati Bantul.**

menerapkan sistem pelaporan yang tersistematis sehingga meminimalisir selip dalam pencatatan pelaksanaan laporan keuangan daerah.

"Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Aset Daerah juga menjadi pendorong keberhasilan Bantul dalam mempertahankan Opini WTP," jelasnya.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), imbuhnya menjadi garda

dan garis depan mempertahankan opini WTP dari BPK. "Ambil contoh dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dari perencanaan pengadaan, pencatatan, distribusi, pemanfaatan, pemeliharaan, pemindahtanganan hingga penghapusan, harus dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel," tutur Helmy.

Bupati Bantul, Drs H Suharsono, mengaku bangga dan apresiasi atas

prestasi ini. Menurutnya, Opini WTP yang didapat merupakan hasil kerja keras seluruh pihak yang patut disyukuri ditengah kondisi dan situasi tengah terkena dampak pandemi global Covid-19. "Saya berharap prestasi ini terus ditingkatkan hingga minim catatan," ungkapnya.

Adapun pemeriksaan Neraca Pemkab Bantul telah dilakukan oleh BPK sejak 31 Desember 2019 lalu. Adapun pemeriksaan BPK ini sesuai dengan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Beberapa hal yang diperiksa di antaranya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). (Aje)-a



KR-Rahajeng Pramesi

**Penandatanganan naskah catatan oleh Bupati Bantul, Drs H Suharsono dan Ketua DPRD Bantul, Hanung Rahardjo SH.**